

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SITUBONDO

## 2013-2017



# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SITUBONDO

## 2013-2017



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)  
KABUPATEN SITUBONDO  
MENURUT PENGELUARAN  
TAHUN 2013 - 2017**

Katalog BPS : 9302023.3512  
Nomor Publikasi : 350120.1802  
Ukuran Buku : A4 (21cm x 29,7 cm)  
Jumlah Halaman : vi + 58  
Naskah : Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik  
Diterbitkan Oleh : BPS Kabupaten Situbondo

*Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya*

## **TIM PENYUSUN**

### **Penanggungjawab Umum**

Ir.Prayogo Setyo Widodo, MM

### **Penyunting**

Prayudho Bagus Jatmiko

### **Penulis**

Prayudho Bagus Jatmiko, S.ST, M.Si

### **Pengolah Data**

Syamsu Kadaryono, SE

### **Gambar Kulit**

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

<https://situbonekab.go.id>

## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi.

Publikasi “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Situbondo Menurut Pengeluaran 2013 - 2017” ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo, menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Situbondo secara deskriptif.

Dalam publikasi ini disajikan tabel-tabel PDRB tahun 2013 - 2017 atas dasar harga berlaku (adhb) dan atas dasar harga konstan (adhk) 2010 dalam nilai nominal dan persentase yang merupakan implementasi *System of National Accounts* (SNA) 2008 dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2014 revisi IV. Sebagai pelengkap ulasan tabel-tabel tersebut, disajikan pula konsep, definisi, ruang lingkup dan metode penghitungan PDRB menurut pengeluaran.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih. Saran perbaikan selalu diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini dimasa mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua.

Situbondo, Juli 2018

**Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Situbondo  
Kepala,**



**Prayogo Setyo Widodo**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1    PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	2
1.2    PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB	6
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	10
2.1    PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)	11
2.2    PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)	13
2.3    PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)	15
2.4    PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	18
2.5    PERUBAHAN INVENTORI (PI)	21
2.6    EKSPOR - IMPOR	24
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SITUBONDO MENURUT PDRB PENGELUARAN 2013 -2017	25
3.1    PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN	26
3.2    PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN	34
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN SITUBONDO	46
4.1    PDRB (NOMINAL)	47
4.2    PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB	48
BAB V. PENUTUP	49
LAMPIRAN	51
DAFTAR PUSTAKA	57



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

<https://situbondokab.bps.go.id>



## 1.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep<sup>2</sup> penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda seperti yang disampaikan di atas dimaksudkan untuk:

- i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi;
- ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan
- iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*).

<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

<sup>2</sup> *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian, PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlakukan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber

pendapatan masyarakat<sup>3</sup>, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y ( <i>Income</i> )	= PDRB Produksi
C ( <i>Consumption</i> )	= Konsumsi akhir
GFCF ( <i>Gross Fixed Capital Formation</i> )	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta$ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

---

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik  
- Disebut sebagai pendekatan “riil”  
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

<https://situbondokab.bps.go.id>

## 1.2. PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

### Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB/PDRB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB/PDRB, maka perubahan tahun dasar PDB/PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB/PDRB.

### Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

## Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

## Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

## Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>4</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

---

<sup>4</sup> SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

## Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
  - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil

menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

### Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



**BAB II**  
**METODE ESTIMASI**  
**DAN**  
**SUMBER DATA**

<https://situbonekab.bps.go.id>

## 2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

### i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran<sup>5</sup>. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

### ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya makanan dan perumahan.

### iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

---

<sup>5</sup> Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

#### iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

#### v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

## **2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)**

### **i Pendahuluan**

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### **ii Konsep dan definisi**

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### **iii. Cakupan**

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

**iv. Sumber Data**

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

**v. Metoda Estimasi**

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

## 2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumahtangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

### ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

### iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

### iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

### v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan *men-deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
<b>Belanja Pegawai</b>	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
<b>Belanja Barang</b>	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
<b>Penyusutan</b>	Indeks Implisit PMTB	
<b>Belanja Bansos</b>	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
<b>Penerimaan barang dan jasa</b>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<b>Social Transfer in kind</b>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<b>Output BI</b>		Neraca Jasa



## 2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

### i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

### ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

### iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

#### iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

#### v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

##### ✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

- Pendekatan Supply :

$$\text{PMTB adhb} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$$

- Pendekatan Ekstrapolasi :

$$\text{PMTB adhk (t)} = \text{PMTB atas dasar harga (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$$

<https://situbondokab.bps.go.id>

## 2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

### i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

### iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen ini adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia;
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

## v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

### a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

### b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}$$

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

## 2.6. EKSPOR - IMPOR

### i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

### ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

### iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai *Net Ekspor*.

### iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan metoda tidak langsung.

**BAB III**  
**TINJAUAN PEREKONOMIAN**  
**KABUPATEN SITUBONDO**  
**MENURUT PDRB PENGELUARAN**  
**2013 -2017**

<https://situbondokab.bps.go.id>



### 3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

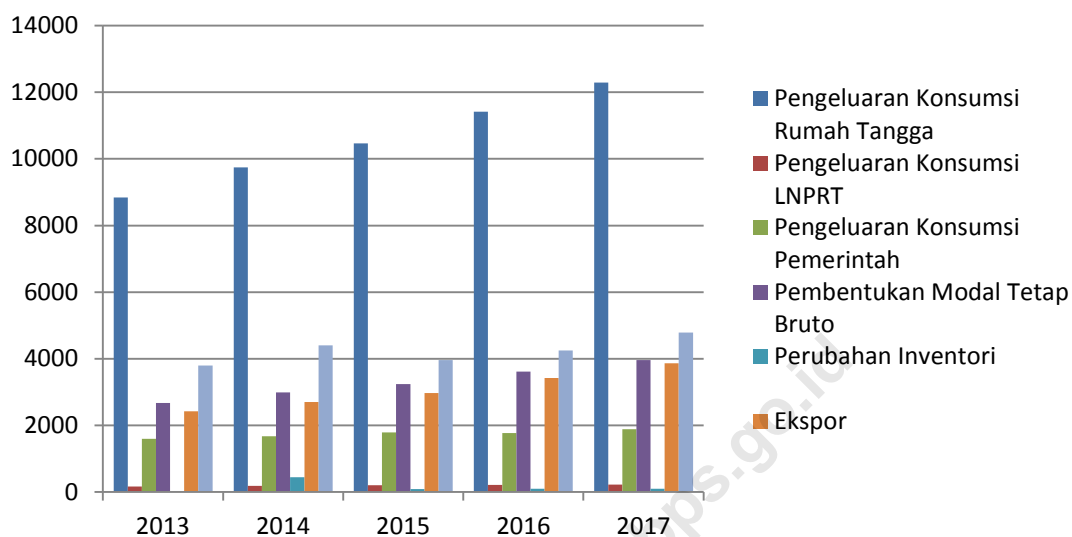
Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Situbondo atas dasar harga berlaku di tahun 2017 meningkat sebesar 7,77 %, yakni dari 16 280,7 miliar rupiah (2010=100) menjadi 17.545,0 miliar rupiah (2010=100). Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, maka peningkatan ini relatif lebih kecil, yakni dari 11 640,8 miliar rupiah (2010=100) menjadi 12 230,4 miliar rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 5,07 persen. Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Situbondo periode 2013 - 2017 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen, yakni sebesar 6,19 persen; 5,79 persen; 4,86 persen; 5,00 persen; dan 5,07 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*).

Dari sisi produksi, terdapat 11 kategori yang tumbuh di atas 5 persen yang meliputi 2 kategori yang tumbuh di atas 8 persen, 3 kategori yang tumbuh antara 7 - 8 persen, 5 kategori yang tumbuh antara 6 - 7 persen, dan 1 kategori yang tumbuh antara 5 - 6 persen. Sedangkan 6 kategori lainnya hanya tumbuh dibawah 5 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Penyedia akomodasi dan makan minum yang tumbuh 9,02 persen tahun 2017, disusul kategori Industri Pengolahan sebesar 8,23 persen dan Kategori Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara itu kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang hanya tumbuh 0,95 persen merupakan kategori dengan pertumbuhan terendah.

Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo didominasi pertumbuhan komponen Ekspor, meskipun kontribusinya bukan yang terbesar dari total PDRB tahun 2017. Komponen Ekspor tumbuh di atas 7 persen tepatnya sebesar 7,42 persen dengan kontribusi 22,04 persen dari perekonomian Situbondo. Berikutnya adalah komponen Impor yang tumbuh 5,14 persen (kontribusi 27,26 persen). Sementara itu komponen Pengeluaran Komsumsi Rumah tangga yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu sebesar 70,04 persen hanya tumbuh kurang dari 5 persen, tepatnya sebesar 4,57 persen.

**Grafik 1**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran**  
**Kabupaten Situbondo, 2013 – 2017 (Milyar Rp)**



Pada periode tahun 2013 - 2017 PDRB Kabupaten Situbondo atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 11,92 trilyun rupiah (2013); 13,34 trilyun rupiah (2014); 14,80 trilyun rupiah (2015); 16,28 trilyun rupiah dan 17,55 trilyun rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Situbondo pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1.

Bila ditinjau dari komponen pembentuk PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku dalam periode 2013 - 2017, komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga (PK-RT) merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar dengan membentuk 8,84 trilyun rupiah pada tahun 2013 hingga mencapai 12,29 trilyun rupiah pada tahun 2017. Berikutnya adalah komponen Impor sebesar 3,80 trilyun rupiah tahun 2013 dan berkembang menjadi 4,79 trilyun rupiah tahun 2017. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen terbesar ketiga dengan 2,67 trilyun rupiah (2013); 2,97 trilyun rupiah (2014); 3,24 trilyun rupiah (2015); 3,61 trilyun rupiah (2016); dan 3,96 trilyun rupiah (2017). Komponen terbesar keempat adalah komponen Ekspor. Komponen ini memberikan share sebesar 2,42 trilyun rupiah tahun 2013 hingga menjadi 3,87 trilyun rupiah tahun 2017. Sementara itu, komponen Perubahan Inventori merupakan komponen penyumbang terkecil dalam PDRB Pengeluaran dengan 6,80 milyar rupiah tahun 2013 dan 96,13 trilyun milyar tahun 2017.

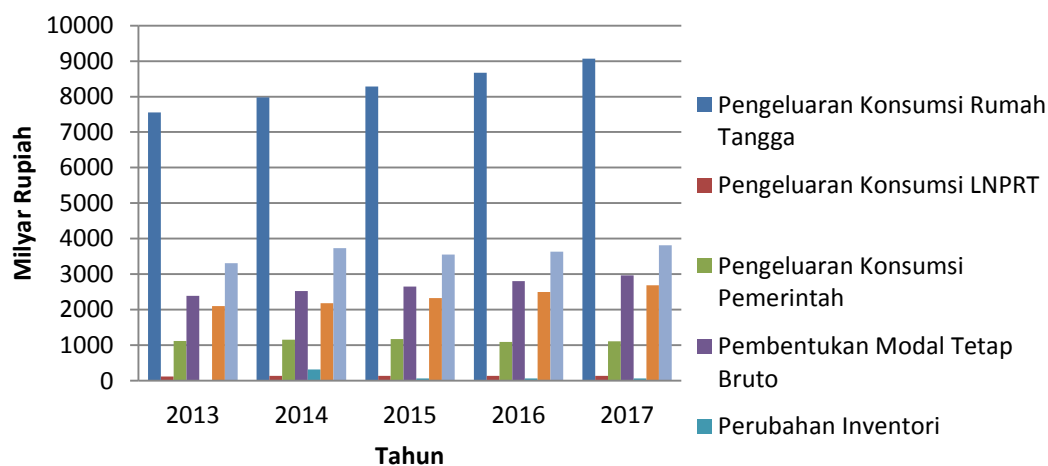
Tabel 1.

PDRB Atas Dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo  
2013 - 2017 (Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8,839.85	9,744.0	10,462.8	11,416.3	12,288.6
2. Konsumsi LNPRT	166.3	187.3	203.8	215.1	225.6
3. Konsumsi Pemerintah	1,597.6	1,673.5	1,789.9	1,774.8	1,888.0
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,672.2	2,986.9	3,237.3	3,613.1	3,961.8
5. Perubahan Inventori	6.8	442.0	92.1	94.6	96.1
6. Ekspor	2,423.2	2,703.5	2,972.8	3,418.6	3,867.4
7. Impor	3,793.1	4,398.5	3,963.0	4,251.8	4,782.5
PDRB	11,912.8	13,338.8	14,795.7	16,280.8	17,545.0

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Situbondo pada periode 2013 - 2017 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2.

Grafik 2  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Situbondo, 2013 - 2017 (Milyar Rp)

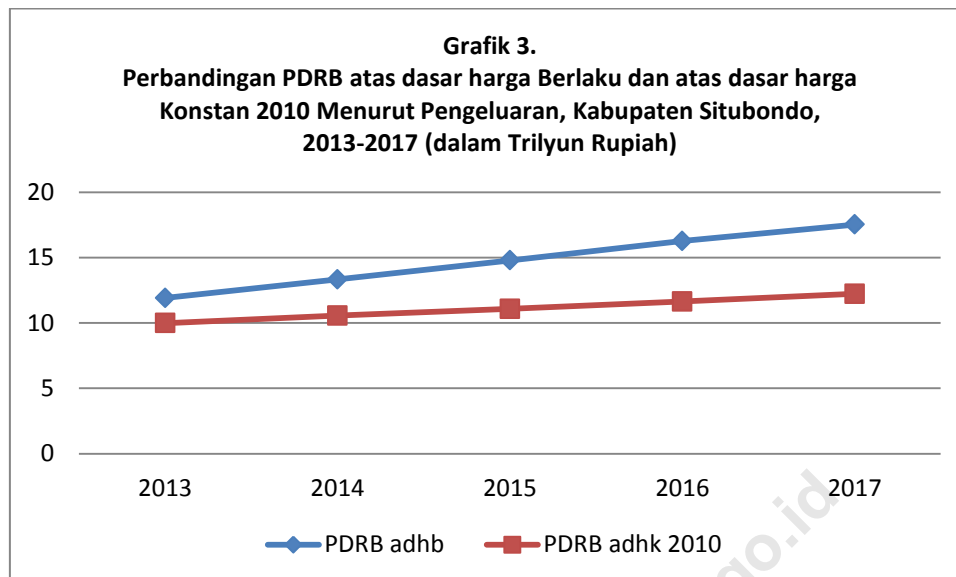


Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Situbondo meningkat, yakni sebesar 9 993,8 miliar rupiah (2013); 10 572,4 miliar rupiah (2014); 11 086,5 miliar rupiah (2015) serta 11.640,8 miliar rupiah (2016) dan 12 230,5 miliar rupiah (2017). Ditinjau dari PDRB atas dasar harga konstan pula, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo yang pada 3 tahun sebelumnya cenderung melambat, namun 3 tahun terakhir kembali menunjukkan geliatnya dan tahun 2017 tumbuh 5,07 persen.

Tabel 2.  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Situbondo,  
2013 - 2017 (Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7 558,2	7 975,8	8 280,6	8 675,0	9 071,2
2. Konsumsi LNPRT	121,7	138,6	139,0	140,7	142,4
3. Konsumsi Pemerintah	1.124,8	1.157,5	1.175,4	1.092,3	1.116,6
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.391,9	2.531,1	2.650,3	2.803,1	2.970,9
5. Perubahan Inventori	5,9	318,9	66,2	62,7	63,7
6. Ekspor	2.103,0	2.183,7	2.327,9	2.498,8	2.684,3
7. Impor	3.311,6	3.733,1	3.552,9	3.631,9	3.818,6
PDRB	9.993,8	10.572,4	11.086,5	11.640,8	12.230,5

Bila ditinjau dari komponen pembentuk PDRB Pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 (2010=100) dalam periode 2013 - 2017, komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga (PK-RT) merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar dengan membentuk 7,56 trilyun rupiah pada tahun 2013 hingga mencapai 9,07 trilyun rupiah pada tahun 2017. Berikutnya adalah komponen Impor sebesar 3,31 trilyun rupiah tahun 2013 dan meningkat menjadi 3,81 trilyun rupiah tahun 2017. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). merupakan komponen terbesar ketiga dengan 2,39 trilyun rupiah (2013); 2,53 trilyun rupiah (2014); 2,65 trilyun rupiah (2015); 2,80 trilyun rupiah (2016); dan 2,97 trilyun rupiah (2017). Komponen terbesar keempat adalah komponen Ekspor. Komponen ini memberikan share sebesar 2,1 trilyun rupiah tahun 2013 hingga menjadi 2,68 trilyun rupiah tahun 2017. Sementara itu, komponen Perubahan Inventori merupakan komponen penyumbang terkecil dalam PDRB Pengeluaran dengan 5,9 milyar rupiah tahun 2013 dan 63,7 milyar rupiah tahun 2017.



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diabaikan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

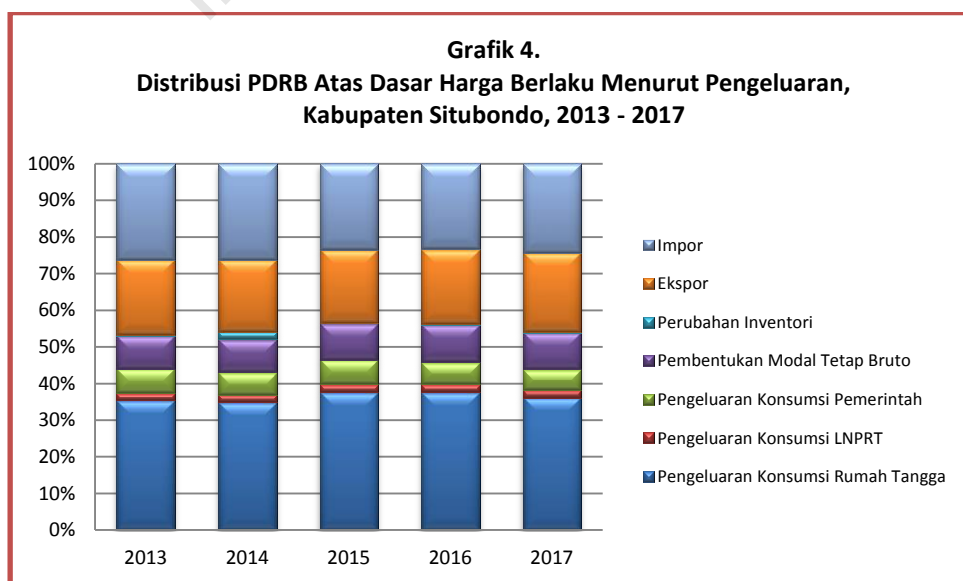
Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2013-2017, PDRB Kabupaten Situbondo sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), dengan kontribusi diatas 70 persen. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang besar, yakni sekitar 22 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 20 s.d 22 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 26 s.d 33 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Tabel 3.  
Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Situbondo, 2013 - 2017 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	74,20	73,05	70,72	70,12	70,04
2. Konsumsi LNPRT	1,40	1,40	1,38	1,32	1,29
3. Konsumsi Pemerintah	13,41	12,55	12,10	10,90	10,76
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,43	22,39	21,88	22,19	22,58
5. Perubahan Inventori	0,06	3,31	0,62	0,58	0,55
6. Ekspor	20,34	20,3	20,1	21,0	22,04
7. Impor	31,84	33,0	26,8	26,1	27,26
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 10 - 13 persen. Pada tahun 2013, kontribusi PK-P sebesar 13,41 persen. Kontribusinya semakin kecil dalam empat tahun berikutnya, hingga hanya mencapai 10,76 persen pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Pada perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu menunjukkan posisi “defisit” atau merugi, dimana nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai impor.



Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2013 - 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo mengalami perlambatan di tahun 2015, yakni sebesar 6,19 persen (2013); 5,79 persen (2014); 4,86 persen (2015); namun kembali meningkat pada tahun 2016 (5,00 persen) sampai 2017 sebesar 5,07 persen. Dari tabel 4 juga terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Komponen ekspor merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan paling pesat pada tahun 2017 yaitu tumbuh lebih dari 7 persen, dan selalu meningkat di tahun tahun sebelumnya. Sedangkan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) meskipun memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Situbondo, namun tumbuh kurang dari 5 persen pada tahun 2017.

Tabel 4.  
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Situbondo, 2013 - 2017 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,05	5,52	3,82	4,76	4,57
2. Konsumsi LNPRT	11,42	13,92	0,28	1,25	1,22
3. Konsumsi Pemerintah	7,57	2,91	1,55	-7,07	2,22
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,95	5,82	4,71	5,77	5,98
5. Perubahan Inventori	1.856,31	5.318,39	-79,25	-5,25	1,54
6. Ekspor	7,6	3,8	6,6	7,3	7,42
7. Impor	3,7	12,7	-4,8	2,2	5,14
PDRB	6,19	5,79	4,86	5,00	5,07

Indeks implisit<sup>6</sup> PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2013 - 2017, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

<sup>6</sup> Indeks perkembangan

Tabel 5.  
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Situbondo  
2013 - 2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	116,96	122,17	126,35	131,60	135,47
2. Konsumsi LNPRT	136,74	135,18	146,64	152,88	158,39
3. Konsumsi Pemerintah	142,04	144,59	152,28	162,48	169,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	111,72	118,01	122,15	128,90	133,35
5. Perubahan Inventori	115,53	138,60	139,13	150,89	151,00
6. Ekspor	115,2	123,8	127,7	136,81	144,08
7. Impor	114,5	117,8	111,5	117,07	125,24
PDRB	119,20	126,17	133,46	139,86	143,45

Indeks Implisit Situbondo tahun 2013 sebesar 116,96 meningkat menjadi 135,47 pada tahun 2017 atau dengan rata-rata sekitar 5,94 poin per tahun. Bila kita perhatikan komponennya, implisit tertinggi adalah komponen ekspor dengan implisit sebesar 144,08 persen. Hal ini menunjukkan, bahwa perubahan harga pada komponen ekspor lebih tinggi dari pada perubahan harga pada PDRB secara total.



## 3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPR dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Situbondo untuk periode 2013 - 2017.

### 3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Situbondo ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Situbondo maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 12 (dua belas) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok Makanan dan minuman tidak beralkohol; Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik; Pakaian dan alat kaki; Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya; Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin; Kesehatan; Angkutan; Komunikasi; Rekreasi/hiburan dan kebudayaan; Pendidikan; Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013 - 2017 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran

konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 6.  
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Situbondo,  
2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	8.839,85	9.744,0	10.462,8	11.416,3	12.288,6
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	7.558,2	7.975,8	8.280,6	8.675,0	9.071,2
Proporsi terhadap PDRB ADHB	74,20	73,05	70,72	70,12	70,04
Rata-rata konsumsi per-Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	13.379	14.630	15.623	16.956	18.160
b. ADHK 2010	11.440	11.975	12.364	12.885	13.405
Pertumbuhan <sup>7</sup>					
a. Total konsumsi RT	5,05	5,52	3,82	4,76	4,57
b. Perkapita	4,60	4,68	3,25	4,21	4,04
Jumlah penduduk (orang)	657 874	660 702	666 013	669 713	673 282

Selama periode 2013 – 2017 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB semakin kecil. Meskipun demikian kontribusinya masih sangat besar diatas 70 persen, yaitu 74,20 persen (2013); 73,05 persen (2014); 70,72 persen (2015) dan 70,12 persen (2016) serta 70,04 persen (2017). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 74,64 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 70,04 persen.

Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013, setiap orang di Kabupaten Situbondo menghabiskan dana sekitar 13,3 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhannya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 14,63 juta rupiah (2014); 15,62 juta rupiah (2015); dan 16,95 juta rupiah (2016) serta 18,16 juta rupiah (2017). Sementara itu, atas dasar harga Konstan 2010, rata-rata konsumsi rumahtangga tumbuh pada kisaran 3 sampai 5 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 5,52 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan

<sup>7</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi perkapita secara “riil” meningkat pada kisaran 3,25 s.d 4,68 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.  
Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Situbondo  
2013 – 2017<sup>8</sup> (Persen)

Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan dan Minuman Non Berakohol	34,05	33,51	33,19	32,77	32,10
b. Minuman Berakohol dan Rokok	4,98	4,69	4,79	4,78	4,64
c. Pakaian	3,48	3,32	3,27	3,21	3,22
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	8,49	8,37	8,16	8,10	8,13
e. Perabot, Peralatan Rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	2,52	2,40	2,31	2,27	2,22
f. Kesehatan	3,56	3,28	3,40	3,46	3,48
g. Transportasi/Angkutan	15,33	16,00	15,98	15,99	16,20
h. Komunikasi	3,93	4,12	4,26	4,35	4,45
i. Rekreasi dan Budaya	3,21	3,45	3,40	3,34	3,38
j. Pendidikan	2,72	2,66	2,86	2,93	3,01
k. Restoran dan Hotel	15,86	16,30	16,53	16,98	17,34
l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1,86	1,89	1,84	1,82	1,82
Total Konsumsi Rumahtangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pada tahun 2013 pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga sebesar 5,05 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 5,52 persen (2014); 3,82 persen (2015); dan 4,76 persen (2016) serta 4,57 persen (2017). Sementara itu pertumbuhan konsumsi perkapita pada masing-masing tahun adalah 4,60 persen (2013); 4,68 persen (2014); 3,25 persen (2015); 4,21 persen (2016) dan ); 4,04 persen (2017). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumahtangga lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 0,5 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu

<sup>8</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

sebesar 8,23 persen pada harga kelompok Restoran dan Hotel; dan kelompok rekreasi dan budaya sebesar 5,37 persen. Pada tahun 2017 laju implisitnya konsumsi rumah tangga sebesar 2,94 dimana laju implisit terbesar adalah 5,58 persen pada harga subkomponen pendidikan; dan terendah sebesar 2,00 persen pada sub komponen Perabot, Peralatan Rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah.

Tabel 8.  
Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Situbondo  
2013 – 2017<sup>9</sup> (Persen)

Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan dan Minuman Non Berakohol	4,79	4,60	3,60	3,63	2,17
b. Minuman Berakohol dan Rokok	2,27	0,56	7,07	7,82	3,25
c. Pakaian	1,87	0,21	1,12	3,87	3,24
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	2,56	4,39	1,08	1,89	2,43
e. Perabot, Peralatan Rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	3,79	4,55	1,83	2,15	2,00
f. Kesehatan	3,48	0,04	6,76	6,71	3,66
g. Transportasi/Angkutan	3,64	4,60	1,82	2,83	2,33
h. Komunikasi	5,30	5,45	2,02	3,91	2,94
i. Rekreasi dan Budaya	5,37	8,97	1,89	2,12	3,11
j. Pendidikan	4,06	2,00	9,31	6,22	5,58
k. Restoran dan Hotel	8,23	6,63	4,88	6,88	4,88
l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	2,35	5,42	2,53	3,45	3,24
<b>Konsumsi Akhir Rumah tangga</b>	<b>4,55</b>	<b>4,46</b>	<b>3,43</b>	<b>4,15</b>	<b>2,94</b>

### 3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013 konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku sebesar 166,3 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 187,3 miliar rupiah (2014); 203,8 miliar rupiah (2015); 215,1 miliar rupiah (2016) dan 225,6 miliar rupiah (2017). Pada periode yang sama, kontribusinya terhadap total PDRB tidaklah besar, hanya sekitar 1 persen saja setiap

<sup>9</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

tahunnya, dimana yang tertinggi sebesar 1,40 persen pada tahun 2013 serta tahun 2014 dan terendah sebesar 1,29 persen tahun 2017.

Sementara itu, pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Berturut-turut pertumbuhannya adalah 11,42 persen (2013), 13,92 persen (2014), 0,28 persen (2015), dan 1,25 persen (2016) serta 1,22 persen (2017).

Tabel 10.  
Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Situbondo  
2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	166,3	187,3	203,8	215,1	225,6
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	121,7	138,6	139,0	140,7	142,4
Proporsi terhadap PDRB ADHB	1,40	1,40	1,38	1,32	1,29
Pertumbuhan	11,42	13,92	0,28	1,25	1,22

### 3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah

- a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah.
- b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga).
- c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri antara lain:

- a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut.

- b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 11.  
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Situbondo  
2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.597,6	1.673,5	1.789,9	1.774,8	1.888,0
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.124,8	1.157,5	1.175,4	1.092,3	1.116,6
Proporsi terhadap PDRB ADHB	13,41	12,55	12,10	10,90	10,76
Pertumbuhan <sup>10</sup>					
a. Total konsumsi Pemerintah	7,57	2,91	1,55	-7,07	2,22
b. Konsumsi Pemerintah Per Kapita	7,11	2,09	0,99	(7,56)	1,70
Jumlah penduduk (orang)	657 874	660 702	666 013	669 713	673 282

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, kecuali pada tahun 2016 yang terjadi penurunan. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.597,6 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1.673,5 miliar rupiah (2014); 1.789,9 miliar rupiah (2015); 1.774,8 miliar rupiah (2016) dan 1.888,0 miliar rupiah (2017). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami fluktuasi pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi fluktuasi pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami penurunan dari 13,41 persen (tahun 2013) hingga mencapai 10,76 persen (tahun 2017). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 10,76 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2013 yang sebesar 13,41 persen.

<sup>10</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan adanya fluktuasi, hal ini diikuti pula oleh adanya fluktuasi pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 2,42 juta rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 2,51 juta rupiah (2014); 2,67 juta rupiah (2015); 2,64 juta rupiah (2016) dan mencapai 2,79 juta rupiah pada tahun 2017.

Rata-rata konsumsi pemerintah perkapita atas dasar harga konstan 2010 juga fluktuatif setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 1,70 juta rupiah (2013) dan turun 1,64 juta rupiah tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar 7,11 persen (2013) dan menjadi 2,09 persen (2014). Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita yaitu 0,99 persen (2015); minus 7,56 persen (2016) dan 1,70 persen (2017).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata perkapita. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2014 dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 7,57 persen dan 2,91 persen; untuk konsumsi pemerintah perkapita 7,11 persen dan 2,09 persen.

#### **3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>11</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam

---

<sup>11</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 - 2017 berfluktuasi dari 3,95 persen (2013) menjadi 5,98 persen (2017) yang merupakan pertumbuhan tertinggi, sementara di tahun lainnya masing-masing 5,82 persen (2014); 4,71 persen (2015); dan 5,77 persen (2016).

Tabel 12.  
Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Situbondo  
2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.672,2	2.986,9	3.237,3	3.613,1	3.961,8
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.391,9	2.531,1	2.650,3	2.803,1	2.970,9
Proporsi terhadap PDRB ADHB	22,43	22,39	21,88	22,19	22,58
Struktur PMTB <sup>12</sup>					
a. Bangunan					
Milyar Rp	1.794,49	1.903,68	1.998,46	2.123,33	2.252,34
%	75,02	75,21	75,41	75,75	75,81
b. Non Bangunan					
Milyar Rp	597,42	627,39	651,84	679,78	718,53
%	24,98	24,79	24,59	24,25	24,19
Total PMTB	2.391,91	2.531,08	2.650,30	2.803,12	2.970,87
Milyar Rp	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
%					
Pertumbuhan <sup>13</sup> (%)					
a. Bangunan	4,88	6,09	4,98	6,25	6,08
b. Non Bangunan	1,26	5,02	3,90	4,29	5,70
Total PMTB	3,95	5,82	4,71	5,77	5,98

Proporsi PMTB terhadap PDRB dalam 5 tahun terakhir fluktuatif sekitar 21 - 22 persen, dimana terendah sebesar 21,88 persen tahun 2015 dan tertinggi sebesar 22,58 persen tahun 2017. Komponen PMTB dibentuk oleh sub komponen bangunan dan sub komponen non bangunan. Sub komponen bangunan membentuk lebih dari 75 persen PMTB sedangkan sisanya dibentuk oleh sub komponen non bangunan.

<sup>12</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

<sup>13</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)



### 3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 13.  
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Situbondo  
2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	6,8	442,0	92,1	94,6	96,1
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	5,9	318,9	66,2	62,7	63,7
Proporsi terhadap PDRB ADHB	0,06	3,31	0,62	0,58	0,55

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2013 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 6,8 miliar rupiah. Pada tahun 2014 perubahan inventori mencapai nilai tertinggi yaitu lebih dari 318,9 miliar rupiah, namun tahun 2015 dan 2016 kembali turun hingga mencapai 92,1 miliar rupiah dan sebesar 94,6 miliar rupiah. Sedangkan tahun 2017 terjadi sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi sebesar 96,1 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Situbondo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, proporsi perubahan inventori adalah 0,06

persen, selanjutnya 3,31 persen (2014), 0,62 persen (2015), dan 0,58 persen (2016) dan 0,55 (2017). Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,31 persen.

### 3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Situbondo, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 14.  
Perkembangan Ekspor Kabupaten Situbondo  
2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.423,2	2.703,5	2.972,8	3.418,6	3.867,4
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.103,0	2.183,7	2.327,9	2.498,8	2.684,3
Proporsi terhadap PDRB ADHB	20,34	20,3	20,1	21,0	22,04
Pertumbuhan <sup>14</sup>	7,6	3,8	6,6	7,3	7,42

Secara total, dalam kurun waktu 2013 - 2017 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2013 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 2.423,2 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar 2.703,5 miliar rupiah pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015-2017 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 2.972,8 miliar rupiah; 3.418,6 miliar rupiah; dan 3.867,4 miliar rupiah. Nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah yang fluktuatif dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 2.103,0 miliar rupiah (2013); 2.183,7 miliar rupiah (2014); 2.327,9 miliar rupiah (2015) dan 2.498,8 miliar rupiah (2016) serta 2.648,3 miliar rupiah (2017). Sementara itu, pada periode 2013 s.d 2017, proporsinya dalam PDRB juga berfluktuatif dari 20,34 persen pada tahun 2013 menjadi 22,04 persen di tahun 2017.

<sup>14</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tinggi, khususnya pada tahun 2015 sampai 2017 dengan masing-masing tahun mencapai lebih dari 6 persen. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 7,6 persen (2013); 3,8 persen (2014); 6,6 persen (2015), 7,3 persen (2016) dan 7,4 persen di tahun 2017.

### 3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Situbondo. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Situbondo di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Situbondo terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Tabel 15.  
Perkembangan Impor Kabupaten Situbondo  
2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.793,1	4.398,5	3.963,0	4.251,8	4.782,5
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3.311,6	3.733,1	3.552,9	3.631,9	3.818,6
Proporsi terhadap PDRB ADHB	31,84	33,0	26,8	26,1	27,26
Pertumbuhan <sup>15</sup>	3,7	12,7	-4,8	2,2	5,14

Data pada tabel di atas tersebut menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Situbondo berfluktuasi (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2013 s.d 2017. Pada tahun 2013 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 3.793,1 miliar rupiah, kemudian meningkat di tahun 2014 menjadi 4.398,1 miliar rupiah; 3.963,0 miliar rupiah pada tahun 2015; 4.251,8 miliar rupiah pada tahun 2016; dan menjadi 4.782,5 miliar rupiah pada tahun 2017. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2013 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 31,84 persen. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa meningkat menjadi 33,0 persen dan 26,8 persen pada tahun 2014 dan tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2016 - 2017 proporsi impor barang dan jasa sebesar 26,1 persen; dan 27,26 persen.

<sup>15</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

**BAB IV**  
**PERKEMBANGAN AGREGAT**  
**PDRB PENGELUARAN**  
**KABUPATEN SITUBONDO**  
**2013 - 2017**

<https://situbondokab.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

#### 4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Situbondo di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 16.  
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Situbondo  
2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	11,912.8	13,338.8	14,795.7	16,280.8	17,545.0
b. ADHK 2010	9,993,8	10,572,4	11,086,5	11,640,8	12,230,5
PDRB Perkapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	13.379	14.630	15.623	16.956	18.160
b. ADHK 2010	11.440	11.975	12.364	12.885	13.405
Pertumbuhan (%)					
a. PDRB	6,19	5,79	4,86	5,00	5,07
b. PDRB Perkapita	4,60	4,68	3,25	4,21	4,04
c. Penduduk	0,43	0,80	0,56	0,53	0,51
Jumlah Penduduk	657 874	660 702	666 013	669 713	673 282

Pada periode 2013 - 2017 nominal PDRB Kabupaten Situbondo atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, dari sebesar 11,91 trilyun rupiah tahun 2013 menjadi 17,54 trilyun rupiah tahun 2017. Pada periode yang sama nominal PDRB atas dasar harga konstan juga meningkat dari sebesar 9,99 trilyun rupiah tahun 2013 menjadi 12,23 trilyun rupiah tahun 2017 dengan pertumbuhan 5,07 persen pada tahun 2017.

## 4.2. PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 17.  
Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Situbondo  
2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (Miliar Rp)	10.603,77	11.604,85	12.456,52	13.406,19	14.402,19
a. Rumah tangga	8.839,85	9.744,0	10.462,8	11.416,3	12.288,6
b. LNPRT	166,3	187,3	203,8	215,1	225,6
c. Pemerintah	1.597,6	1.673,5	1.789,9	1.774,8	1.888,0
PDRB ADHB (Miliar Rp)	11.912,8	13.338,8	14.795,7	16.280,8	17.545,0
Proporsi (%)	89,01	87,00	84,19	82,34	82,09
Proporsi Konsumsi Akhir ADHB (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
a. Rumah tangga	83,37	83,96	83,99	85,16	85,32
b. LNPRT	1,57	1,61	1,64	1,60	1,57
c. Pemerintah	15,07	14,42	14,37	13,24	13,11

Kontribusi total konsumsi akhir dalam perekonomian Situbondo tahun 2013 sebesar 10,60 trilyun rupiah atau sebesar 89,01 persen. Angka ini terus menurun hingga mencapai 82,09 persen tahun 2017. Komponen pengeluaran rumah tangga memegang peranan paling besar dalam konsumsi akhir tersebut dengan kontribusi lebih dari 80 persen periode 2013 – 2017 dari seluruh total konsumsi akhir. Pada periode yang sama, komponen pengeluaran konsumsi LNPRT stabil pada kisaran 1 – 2 persen dari keseluruhan konsumsi akhir.

***BAB V***  
***PENUTUP***

<https://situbondok.go.id>



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 s.d 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Situbondo pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 s.d 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Situbondo terhadap ekonomi luar daerah.

## ***LAMPIRAN***

<https://situbondokab.bps.go.id>

## Lampiran 1

(Seri 2010)  
PDRB Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah),  
2013 - 2017

Komponen Pengeluaran		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.839.847,0	9.743.964,8	10.462.828,1	11.416.295,4	12.288.627,3
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	166.348,5	187.341,9	203.798,8	215.126,0	225.584,3
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.597.570,3	1.673.542,9	1.789.894,4	1.774.770,4	1.887.978,3
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.672.199,1	2.986.903,2	3.237.294,2	3.613.126,0	3.961.756,0
5	Perubahan Inventori	6.800,3	442.044,4	92.066,6	94.598,8	96.129,5
6	Ekspor Barang dan Jasa	2.423.176,8	2.703.533,4	2.972.767,7	3.418.625,1	3.867.435,6
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3.793.118,4	4.398.512,5	3.962.997,1	4.251.785,5	4.782.495,0
8	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.912.823,6	13.338.818,1	14.795.652,7	16.280.756,2	17.545.016,0

## Lampiran 2

(Seri 2010)  
PDRB Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah),  
2013 - 2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.558.240,7	7.975.803,5	8.280.609,0	8.675.028,8	9.071.169,7
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	121.657,5	138.590,3	138.974,8	140.712,0	142.426,6
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.124.766,6	1.157.455,4	1.175.390,3	1.092.317,2	1.116.582,0
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.391.905,6	2.531.075,5	2.650.297,0	2.803.118,0	2.970.870,6
5 Perubahan Inventori	5.886,0	318.926,5	66.171,2	62.695,7	63.661,4
6 Ekspor Barang dan Jasa	2.103.011,4	2.183.667,3	2.327.928,2	2.498.800,5	2.684.320,5
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3.311.622,1	3.733.144,8	3.552.887,3	3.631.913,6	3.818.571,4
8 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.993.845,7	10.572.373,7	11.086.483,2	11.640.758,6	12.230.459,3

### Lampiran 3

(Seri 2010)

#### Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen), 2013 - 2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,05	5,52	3,82	4,76	4,57
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,42	13,92	0,28	1,25	1,22
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,57	2,91	1,55	-7,07	2,22
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,95	5,82	4,71	5,77	5,98
5 Perubahan Inventori	1.856,31	5.318,39	-79,25	-5,25	1,54
6 Ekspor Barang dan Jasa	7,6	3,8	6,6	7,3	7,42
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3,7	12,7	-4,8	2,2	5,14
8 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,19	5,79	4,86	5,00	5,07

## Lampiran 4

(Seri 2010)  
Distribusi PDRB Kabupaten Situbondo Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Pengeluaran (Persen),  
2013 - 2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	74,20	73,05	70,72	70,12	70,04
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,40	1,40	1,38	1,32	1,29
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,41	12,55	12,10	10,90	10,76
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	22,43	22,39	21,88	22,19	22,58
5 Perubahan Inventori	0,06	3,31	0,62	0,58	0,55
6 Ekspor Barang dan Jasa	20,34	20,3	20,1	21,0	22,04
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	31,84	33,0	26,8	26,1	27,26
8 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Lampiran 5

(Seri 2010)  
Laju Implisit PDRB Kabupaten Situbondo  
Menurut Pengeluaran (Persen),  
2013 - 2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,55	4,46	3,43	4,15	2,94
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,88	-1,14	8,48	4,25	3,60
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,02	1,80	5,32	6,70	4,07
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,56	5,63	3,51	5,52	3,46
5 Perubahan Inventori	2,74	19,97	0,38	8,45	0,08
6 Ekspor Barang dan Jasa	3,0	7,4	3,1	7,1	5,3
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3,1	2,9	-5,3	5,0	7,0
8 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,77	5,84	5,78	4,80	2,57

## ***DAFTAR PUSTAKA***

<https://situbondokab.bps.go.id>



1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. \_\_\_\_\_, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**

**— *Enlighten The Nation* —**



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SITUBONDO**

***BPS-Statistics of Situbondo Regency***

***Jalan Raya Wringinanom - Situbondo***

***Email : bps3512@bps.go.id homepage : <http://Situbondokab.bps.go.id>***